Konsep Pendidikan Islam

Telaah Pemikiran Pendidikan Mohammad Natsir

Oleh H. Imam Moedjiono

Dosen FIAI UII Yogyakarta

Mohammad Natsir dikenal sebagai seorang pemikir produktif dan juga salah satu tokoh Islam di abad ini. Ia lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang Sumatera Barat dan meninggal dunia di Jakarta 6 Februari 1993 (Luth, 1999 : 27). Sebagai tokoh, sudah tentu semua sikap, tindak tanduk dan perjuangannya merupakan bagian integral dari proses interaksi pemikiran dengan situasi sosio-kultural yang pernah melatar belakangi kehidupannya.

Pemikiran seorang tokoh, tidak mungkin lahir dalam suasana kevakuman sosial, karena hal ini merupakan proses interaksi dalam menyikapi situasi yang terjadi. Dialektika antara potensi diri dengan situasi lingkungannya melahirkan corak pemikiran yang sesungguhnya. Demikian pula Natsir. Corak pemikirannya dapat diformulasikan jika dilacak melalui penelusuran asal-usul, pengalaman dan setting sosial yang pernah dilaluinya.

Natsir tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat taat beragama yang sarat polemik dan wacana pemikiran. Begitu pula latar belakang pendidikannya yang mencerminkan perpaduan antara pendidikan sekuler dan Islam. Pola yang demikian telah membentuk karakter Natsir sebagai seorang yang berpengetahuan secara integral.

Bermodalkan kecerdasan yang dimiliki serta ketekunannya belajar secara *otodidak,* telah melahirkan kecermatannya dalam menganalisis dan menyikapi setiap problema sosial yang terjadi. Daya kritisnya sangat tajam, terutama setelah mendapatkan bimbingan dari beberapa tokoh intelektual muslim handal ketika itu, seperti A. Hassan, Haji Agus Salim, Ahmad Soorkotti dan tokoh terkemuka lainnya.

Dalam merefleksikan corak pemikiran, Natsir agaknya akan menimbulkan pemahaman parsial jika hanya dilihat dari satu sisi keilmuan, karena profilnya bukanlah tipe seorang pemikir murni. Bahkan lebih tepat dikatakan sebagai seorang pemikir reaktif rasionalistik.

Hal ini terlihat dari gagasan yang dilontarkannya, terkesan lebih bersifat responsif terhadap situasi sosio-kultural yang terjadi. Tanggapannya tidak mengacu pada suatu tema, melainkan sangat beragam dan kompilatif. Dengan pertimbangan demikian Yusril Ihza Mahendra menyebutnya dengan pemikir kompilatif fragmentaris (Mahendra, 1995 : 131).

Mencermati karya tulisnya yang berjumlah sekitar 27 buku dan sejumlah artikel yang tersebar dalam berbagai media massa (sekalipun para peneliti berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah karya tulis Natsir.

Ada yang mengatakan 20 buah dan yang lain mengatakan 27 buah dan perbedaan itu disebabkan banyak tulisan Natsir yang diterbitkan dalam suatu judul kemudian dihimpun kembali oleh penerbit yang lain dengan judul yang berbeda (Abibullah Djaini Pengantar, dalam Anwar Haryono, 1996. : xii), lingkup pemikirannya yang dominan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa disiplin keilmuan. Hal dimaksud dapat meliputi teologi, syari'ah, pendidikan, politik, dan dakwah.

Sedangkan pemikiran lainnya seperti filsafat, tasawuf, sejarah dan perbandingan agama lebih merupakan fragmentasi dalam melengkapi corak pemikiran di atas. Tulisan sederhana ini akan melihat salah satu pemikiran Natsir yakni di bidang pendidikan Islam.

Konsep Pendidikan Islam Mohammad Natsir

Menurut Natsir, pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dalam arti sesungguhnya. Sedangkan kata "pimpinan" dalam konteks pendidikan di atas mengandung dua unsur pokok, yakni unsur "tujuan" yang berfungsi mengarahkan proses pendidikan dan unsur "satu asas" sebagai tempat mendasarkannya (al-Abrasyi, tt : 7).

"Tujuan" pendidikan, menurut Natsir tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup manusia, yakni "menyembah Allah". Pertimbangan Natsir karena hakekat pendidikan merupakan upaya merealisasikan tujuan hidup manusia dalam arti yang sesungguhnya, sehingga *inheren* dalam tujuan hidup tersebut.

Pengertian "menyembah Allah" dalam konteks tujuan hidup memiliki makna yang sangat luas. Hal ini bisa mencakup ibadah khusus (*hablum min Allah*) dan ibadah umum (*hablum min al-khalqiah*) melalui aktivitas yang memposisikan manusia sebagai khalifah Tuhan di dunia.

Menurut Natsir, pengertian penyembahan secara spesifik dalam pendidikan adalah: "melengkapi ketaatan dan ketundukan manusia kepada semua perintah Ilahi, yang membawa kejayaan *duniawi* dan kemenangan *ukhrawi*, serta menjauhkan diri dari segala larangan yang dapat menghalangi tercapainya kemenangan dunia dan akhirat itu" (Natsir, 1954 : 58).

Dengan demikian urgensi penyembahan bukanlah untuk kepentingan Allah karena, Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluk-Nya, tapi merupakan "kebutuhan dasar" bagi manusia dalam upaya pembebasan dari penghambaan diri dan rasa ketergantungan terhadap sesama makhluk Tuhan yang terkadang lebih rendah martabatnya dari manusia.

Di sisi lain, Natsir menambahkan bahwa untuk dapat meraih kemenangan hidup dunia dan akhirat, harus didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan, karena hal ini dapat membuat posisi seseorang menjadi terhormat, baik di sisi Allah maupun di sisi sesama makluk. Untuk melengkapi pendapatnya, Natsir mengutip firman Allah yang artinya :

> *"Bahwa sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya takut kepada Allah adalah hamba-hamba-Nya yang mencintai ilmu, sesungguhnya Allah itu maha*

berkuasa dan maha pengampun" (Q.S ,35 :28)

Bertolak dari ayat di atas, kecintaan dalam menuntut ilmu merupakan bagian dari penyembahan diri kepada Allah sekaligus menjadi salah satu tujuan pendidikan yang diinginkan Islam

Menurut Natsir, tujuan pendidikan Islam secara khusus adalah menumbuhkembangkan potensi manusia menjadi makhluk yang selalu berada dalam keseimbangan perkembangan jasmani dan rohaninya, pertumbuhan akal dan budi pekertinya, antara ilmu dan imannya, ikhtiar dan do'anya, hubungannya dengan sesama makhluk beserta alam sekitarnya, serta hubungannya dengan pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah *Rabb al-alamin* (Natsir, 1988 : 324)

Berkait dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang diungkapkan di atas, dalam pandangan Natsir setiap peserta didik memiliki potensi dasar yang berbeda antara satu dan lainnya. Potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis, baik ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Inti proses pendidikan terletak pada upaya menumbuhkembangkan potensi secara optimal dan seimbang ke arah yang baik. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terbentuknya manusia yang memiliki integritas pribadi utuh dan dapat memberikan kebermaknaan hidup bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan alam lingkungan sekitar (Natsir, 1988 : 324).

Konsep dan tujuan pendidikan Islam sebagaimana diformulasikan Natsir, sejalan dengan rumusan hasil kongres pendidikan Islam sedunia yang diselenggarakan di Islamabad pada tahun 1980. Inti pendidikan Islam harus ditujukan ke arah tercapainya pertumbuhan yang berkeseimbangan dari seluruh kepribadian manusia, melalui latihan spiritual, kecerdasan, perasaan, dan pancaindera.

Oleh karenanya, pendidikan Islam mestinya dapat memberikan pelayanan pada pertumbuhan manusia dalam semua aspek kehidupan yang meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, linguistik, baik individual maupun kolektif, serta mendorong ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan agar terlaksana aktivitas pengabdian kepada Allah SWT, sesuai tuntunan yang telah digariskan Islam (Arifin, 1991 : 132).

Berkait dengan "asas" pendidikan Islam, Natsir secara tegas membedakan antara asas sebagai dasar pendidikan Islam dengan sumber pendidikan Islam. Menurutnya asas pendidikan Islam hanya "Tauhid". Ini menjadi pangkal dalam berbuat dan tempat kembalinya semua amal perbuatan. Sedangkan sumber pendidikan yang merupakan sarana mendapatkan ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yakni al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijtihad*. al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber *ilahiah* memiliki kebenaran mutlak, sedangkan *ijtihad* sebagai sumber *insaniah*, tingkat kebenarannya dibatasi oleh tempat dan masa tertentu.

Untuk mendukung argumentasinya, Natsir seringkali mengutip hadis tentang peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah mengutus Muazd ibn Jabal menjadi *qadhi* di Yaman; Rasul bertanya: Dengan apa kamu menjatuhkan suatu hukum?, Muazd

menjawab, saya memutuskannya dengan kitab Allah. Kalau kamu tidak mendapatkannya?, dengan sunnah Rasúlullah. Kalau kamu masih tidak mendapatkannya? Saya akan melakukan ijtihad dengan akal saya dan saya tidak akan berputus asa (Natsir, 1981 : 244)

Menurut Natsir, dalam menyelesaikan realitas kehidupan yang multi kompleks, sumber yang berasal dari ayat al-Qur'an dan al-Sunnah sangat sedikit, sementara permasalahan yang dihadapi selalu dinamis dan berkembang. Untuk mengatasi hal demikian diperlukan keberanian melakukan *ijtihad*.

Dalam pemahaman Natsir, wilayah *ijtihad* sangat luas, yakni mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia, yang belum diatur secara *qat'i* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mendukung alasannya, Natsir mengutip hadis yang berasal dari Anas ibn Malik dan dirawikan oleh Muslim yang artinya :*Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu dari padaku, dan aku lebih tahu urusan akhiratmu dari pada kamu* (Natsir, 1988 : 247).

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, sebagaimana diungkapkan di atas, Islam mewajibkan setiap individu (*fardhu'ain*) untuk menggali ilmu pengetahuan, yang disebutnya dengan istilah *"ulum al-dien"*. Dalam pemahaman Natsir, ilmu yang termasuk *"dien"* bukanlah sebatas ilmu-ilmu keislaman saja, tapi mencakup pula semua disiplin ilmu yang mendatangkan manfaat, termasuk ilmu-ilmu umum, karena semua ilmu berasal dari Tuhandan untuk tujuan untuk kemaslahatan manusia khususnya dan kelestarian alam pada umumnya. Begitu pula untuk dapat meraih kemenangan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, setiap umat Islam dituntut menguasai ilmu pengetahuan, sesuai bakat dan minatnya, baik secara akademis maupun keahlian profesional. Dari berbagai keahlian itulah, pada gilirannya umat Islam akan dapat menguasai ilmu pengetahuan secara *kaffah* (komprehensif) (Natsir, 1970 : 25).

Menurut Natsir, dalam menuntut ilmu pengetahuan Islam tidak memilah persoalan duniawi dan ukhrawi secara dikotomis. Begitu pula antara aspek jasmani dan rohani, karena hal itu bukanlah dua hal yang bertentangan sehingga harus dipisahkan, melainkan dua serangkai yang saling melengkapi dan lebur dalam suatu susunan yang harmonis dan seimbang (Natsir, 1954 : 61)

Islam tidak membedakan ilmu dari segi nilainya, yang dibedakan hanyalah penamaan ilmu sebagai suatu disiplin keahlian. Menuntut ilmu dalam tingkat kebutuhan dasar adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individual). Namun ketika ingin mendalami ilmu secara *takhassus*, sesuai dengan minat dan bakat, termasuk menyediakan ulama yang benar-benar paham permasalahan agama, guna memberikan peringatan pada umat, hal itu menjadi *fardhu khifayah*, karena tidak mungkin setiap orang dapat mendalami semua disiplin ilmu tersebut (Natsir, 1969 : 24).

Begitu pula dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Menurut Natsir, ilmu-ilmu dasar tersebut di samping mencakup persoalan-persoalan mendasar dalam aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, meliputi pula aspek ilmu-ilmu alat

berupa membaca, menulis dan berhitung. Dari ilmu dasar inilah berkembang ke arah *takhassus* (profesional) sesuai fitrah yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam mengembangkan ilmu-ilmu *takhassus*, Natsir menam-bahkan, secara simbolik idealnya ada segolongan umat Islam yang *bermazhab* ke Leiden, Paris, London dan Berlin. Namun ada pula hendaknya golongan *intelegensia* lain yang berpedoman ke Kairo, Mekah, Aligarh dan Delhi. Kedua golongan itu berhak mendapatkan penghargaan yang sama (Natsir, 1969 :71).

Bertolak dari pemahaman Natsir tentang ilmu pengetahuan sebagaimana diungkapkan di atas, secara hukum mencari ilmu pengetahuan, agaknya dapat digambarkan dalam sebuah paradigma berikut ini :

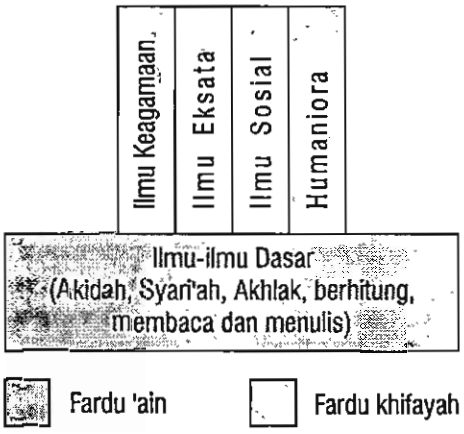

Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, hanya dua instrumen yang dapat digunakan, yakni inderawi dan akal. Melalui inderawi dapat diketahui ilmu-ilmu yang bersifat konkrit, sedangkan melalui akal dapat diketahui ilmu-ilmu yang bersifat *metafisik*, dengan proses olah pikir memahami ayat-ayat Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Di sisi lain, qalbu bukanlah untuk mencari dan membuktikan sesuatu. Akan tetapi wilayah rasa, dapat merasakan ilmu yang baik dan buruk melalui proses pensucian jiwa. Natsir menilai, indera, akal dan qalbu bukanlah instrumen yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan saling berkait dan melengkapi.

Indera mengantarkan akal mengenal alam luar, sedangkan akal dapat memahami sesuatu, sementara hati dapat merasakan kebermaknaan sesuatu yang telah ditemukan akal tersebut (Natsir, 1981 :13).

Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistimatis dan komprehensif, diperlukan corak lembaga pendidikan yang lebih variatif, bisa berbentuk lembaga pendidikan keagamaan dan dapat pula lembaga pendidikan umum. Bagi lembaga pendidikan keagamaan idealnya berorientasi pada pembinaan *liyatafaqqahu fi al-ddin* (ulama), yakni orang yang benar-benar memahami persoalan, seluk-beluk keislaman dan kemampuan dasar pengetahuan umum sebatas kebutuhan individual.

Lembaga pendidikan umum semestinya dapat melahirkan *ulul albab* (intelektual) yang mampu membuktikan, bahwa semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sia-sia bagi manusia. Namun demikian harus pula melengkapi pengetahuan dasar keagamaan, sehingga dapat menerapkan nilai-nilai *akhlaq al-karimah* dalam sikap dan semua tindakannya.

Dalam proses transformasi ilmu, Natsir berpendapat bahwa optimalisasi pengembangan minat dan

bakat peserta didik harus mendapat perhatian serius. Hal ini mengingat, peserta didik adalah manusia yang selalu hidup secara dinamis, di samping mempunyai sifat-sifat umum, masing-masing juga memiliki sifat dan tabiat khusus (Natsir, 1981 : 82). Hal inilah yang mendorong perlunya penyediaan berbagai alternatif lembaga pendidikan.

Dalam aspek metodologis, proses transformasi ilmu pengetahuan, dapat pula diberikan secara variatif sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Hal tersebut menurut Natsir sudah diisyaratkan dalam surat al-Nahl ayat 125 yang artinya :

> *Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan mau'izah (nasehat-nasehat yang baik) dan bermujadalah (bertukar pikiran) dengan cara yang lebih baik,..."* (Natsir, 1981 : 161).

Dari ayat di atas, tergambar secara umum proses transformasi ilmu pada peserta didik dapat ditempuh melalui tiga tingkatan, yakni metode *hikmah, mau'izah* dan *mujadalah*. Ketiga metode tersebut lebih bersifat landasan normatif. Jika diterapkan dalam tataran praksis, prinsip-prinsip metode di atas dapat dikembangkan dalam berbagai model sesuai kebutuhan.

Untuk melengkapi landasan normatif tersebut, dalam konteks lebih spesifik, Natsir melengkapi pendapatnya dengan mengutip pesan Rasulullah melalui sebuah hadis shahih yang artinya :"*Kami diperintahkan supaya berbicara kepada manusia menurut kadar perkembangan akal (kecerdasan) mereka masing-masing*" (Natsir, 1981 : 162).

Bertolak dari landasan di atas, maka dalam tataran implementatif terlihat Natsir mengutip pendapat Muhammad Abduh, tentang perlunya proses transformasi ilmu pengetahuan terhadap peserta didik, yang harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Menurutnya dalam melakukan proses tranformasi ilmu, idealnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kecerdasannya.

Terhadap peserta didik yang masih dangkal pengetahuan dan rendah analisanya, dapat dilakukan metode *mau-izah (tuntunan)* yang dibarengi *'uswah* (memberikan contoh keteladanan). Sedangkan peserta didik yang sudah mampu melakukan analisis sebuah pemikiran, dipergunakan metode *mujadalah* (diskusi), yang sasaran pengembangannya adalah kreativitas berfikir.

Sedangkan bagi kalangan peserta didik yang cerdas dan sudah tinggi pengetahuannya, sehingga mampu memahami persoalan-persoalan abstrak, dapat dihampiri dengan metode hikmah, yang sasarannya difokuskan pada kemandirian dan keberanian mengambil keputusan. Pemahaman Natsir demikian terlihat dalam pernyataannya sebagai berikut:

Pertama, terhadap golongan cendekiawan yang cinta kebenaran, sudah dapat berfikir secara kritis dan cepat serta dapat menangkap makna sebuah persoalan, semestinya dipergunakan "metode hikmah", yakni memberikan argumentasi dengan dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akal.

Kedua, terhadap golongan awam, yakni orang kebanyakan yang belum mampu berpikir kritis dan mendalam,

belum dapat menangkap pengertian yang tinggi-tinggi, harus didekati dengan metode *maidzatun hasanah,* yakni anjuran dan didikan yang baik-baik dan mudah dipahami.

Ketiga, terhadap golongan menengah, yang tingkat kecerdasannya antara ke dua tingkat sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat dicapai dengan metode hikmah dan tidak sesuai pula dengan *mauizah,* tapi dengan metode *mujadalah billati hiya ahsan,* yakni dengan bertukar pikiran secara dialogis, guna mendorongnya berfikir sehat (Natsir, 1981 : 162).

Dari beberapa metode yang diungkap-kan di atas, terlihat metode hikmah lebih berorieantasi pada kecerdasan dan keunggulan. Metode ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi kemampuan memilih saat yang tepat untuk melangkah, mencari kontak dalam alam pemikiran guna dijadikan titik bertolak, kemampuan memilih kata dan cara yang tepat, sesuai dengan pokok persoalan, sepadan dengan suasana serta keadaan orang yang dihadapi (Natsir, 1981 : 225).

Natsir menambahkan, bahwa implikasi metode hikmah akan menjelma dalam sikap dan tindakan berupa: *qaulan syadid*, *qaulun ma'ruf*, *qaulun baligh* berupa *hajrun jamil*, *uswah hasanah* dan *lisan al-hal* (Natsir, 1981 : 225).

Dari aspek kurikulum pendidikan, maka seperangkat mata pejajaran yang diberikan pada peserta didik, semestinya dapat disusun dan dikembangkan secara integral, dengan mempertimbangkan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus, sesuai potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam aspek kepentingan umum misalnya, setiap peserta didik dibekali ilmu-ilmu dasar dan ilmu alat untuk kebutuhan individual dalam berhubungan dengan Khaliknya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan ilmu-ilmu khusus, semestinya setiap lembaga pendidikan, di samping dapat mengembangkan pendidikan *takhassus* dapat pula memilih salah satu pengetahuan ketrampilan yang dapat dijadikan bekal penghidupan bagi peserta didik, setelah menamatkan pendidikannya. Dengan demikian akan tertanam sikap kemandirian, dalam menyikapi realitas kehidupan

Konsep pendidikan integral ini sudah dicanangkan Natsir sejak masih menjadi pimpinan yayasan Pendidikan Islam di Bandung yang programnya dapat dicermati sebagai berikut :

1. Menyediakan kekurangan lembaga pendidikan bagi anak-anak muslim, mengingat akan kehausan masyarakat terhadap pengajaran semakin tinggi.
2. Mengatur pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, agar berdasarkan dan ber-*roh* kepada Islam, baik secara teoritis maupun dalam bentuk praktis.
3. Mengatur segala proses pendidikan yang akan diberikan agar selalu menjaga peserta didik jangan sampai bergantung pada makan gaji atau perburuhan ketika menamatkan pendidikannya, untuk itu ikhtiar yang harus dilakaukan adalah membekalinya untuk dapat bekerja dengan kemampuan sendiri (Ajib Rosidi, 1990 : 169).

Berkait dengan ilmu-ilmu dasar, menurut Natsir suatu hal yang tidak

dapat diabaikan adalah penguasaan ilmu bahasa, karena bahasa merupakan prasyarat awal untuk dapat memahami dan menggali berbagai ilmu pengetahuan. Natsir menegaskan: "Ada tiga bahasa yang idealnya dapat dikuasai peserta didik, yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang semestinya dipergunakan dalam berkomunikasi dan tempat mengamalkan ilmu yang diperoleh. Bahasa Arab merupakan kunci khazanah ilmu-ilmu keislaman, sedangkan Bahasa Inggeris merupakan khazanah ilmu-ilmu moderen dan teknologi (Ajib Rosidi, 1990 : 32).

Khusus bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren, dalam pandangan Natsir bahasa Arab semestinya mendapatkan perhatian serius, karena bahasa Arab tidak hanya sekedar bahasa kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah, tapi sudah merupakan bahasa kebudayaan. Banyak mutiara pemikiran yang sangat berharga pada periode kejayaan Islam yang belakangan menjadi terabaikan karena kurangnya minat dari kalangan generasi muda Islam untuk menelaah kembali. Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya kemampuan penguasaan bahasa Arab. Dalam sebuah pernyataannya Natsir menegaskan :

> *"Bahasa Arab itu bukanlah bahasa agama semata-mata, bukan suatu dialek, bukan bahasa salah satu provinsi, akan tetapi satu bahasa dunia, satu bahasa kebudayaan, satu bahasa pemangku kecerdasan, kunci bermacam pengetahuan dan kaya raya untuk mengutarakan suatu paham atau pengertian, dari yang mudah sampai pada yang sulit, dari yang bersifat maddah sampai pada yang bersifat maknawi, ya,.. malahan lebih kaya dari bahasa Eropah yang manapun jua"* (Ajib Rosidi, 1990 : 210).

Pertimbangan Natsir di atas didasarkan pada realitas sejarah bahwa Islam yang menggunakan bahasa Arab pada periode klasik pernah meraih kejayaan dan menguasai peradaban dunia, telah mewariskan khazanah pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu yang menjadi pangkal tolak bagi kebangkitan peradaban moderen. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa:

> *"Kalau kita meninjau perpustakaan Islam yang telah tumbuh dan berkembang dari abad ke abad, semenjak al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun dan lain-lainnya, maka tidak berlebihan kiranya kita berkata bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi, bahasa falsafah, bahasa ilmu pengetahuan, pendek kata bahasa kebudayaan"* (Ajib Rosidi, 1990 : 320).

Untuk menumbuhkembangkan minat dan kemampuan pengua-saan bahasa Arab di kalangan peserta didik, Natsir menawarkan perlunya ada suatu lembaga khusus yang dapat mengkaji dan mendalami bahasa Arab dari berbagai aspeknya, sehingga benar-benar mampu menggali ilmu agama dan rahasia-rahasianya dari sumber aslinya, hal itu sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup umat Islam dari berbagai lapisan (Ajib Rosidi, 1990 : 320).

Menyikapi kurikulum pendidikan Islam yang berlaku ketika itu, Natsir

terlihat mengeritiknya karena dinilainya terlalu sarat dengan mata pelajaran dan hafalan. Menurut Natsir idealnya kurikulum tersebut dapat disederhanakan. Mata pelajaran dimaksud tidak perlu terlalu banyak, tapi lebih sistimatis dan terarah, karena tidak mungkin semua peserta didik menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Yang perlu dibekali peserta didik adalah rumpun ilmu yang diminatinya, kemudian didukung dengan penguasaan bahasa yang baik pada gilirannya perserta didik dapat mengkembangkan *ruh intiqad* terhadap ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam aspek kelembagaan, Menurut Mohammad Natsir, ada tiga pilar lembaga pendidikan Islam yang semestinya mendapatkan perhatian serius dan dikembangkan secara sistemik, yakni "pondok pesantren", "masjid" dan "kampus". Pesantren sebagai pilar pertama, malahan disebut Natsir sebagai "benteng terakhir umat Islam", lembaga tersebut merupakan sarana pendidikan dan pengembangan masyarakat yang selama ini didirikan dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri, yang sasarannya dapat mengoptimalkan potensi peserta didik ke arah tercapainya *tafaqquh fi al-ddin* (ulama). Sistem pendidikan pondok pesantren ini idealnya bersifat terbuka dengan menawarkan "kebebasan yang berdisiplin" dalam bidang keilmuan (Chirzin dalam Endang Syaifuddibn Anshari dan Amin Rais, 1988 : 102). Pola yang demikian akan mendorong peserta didik untuk berani melakukan *ijtihad* dan terhindar sikap fanatisme *mazhab* yang berkembang dalam Islam belakangan ini.

Menurut Mohammad Natsir, lembaga pondok pesantren idealnya tidak hanya sekedar tempat menimba ilmu pengetahuan, tapi sekaligus menjadi tempat beribadah, tempat menempa diri, tempat latihan bermasyarakat dan lingkungan ke arah tercapainya nilai-nilai islami secara komprehensif. Dengan demikian, keberadaan pesantren benar-benar relevan dengan kebutuhan umat yang selalu dinamis dan berkembang. Tugas pesantren adalah menghidupkan kembali dinamika. Nilai-nilai kepesantrenan dalam segala lini kehidupan. Yang dimaksud nilai-nilai kepesantrenan oleh Natsir adalah seperangkat tata nilai yang menjadi pusat orientasi, sumber motivasi serta menjadi dasar dan acuan bagi seluruh kegiatan dan kehidupan di lingkungan pondok pesantren, nilai dimaksud adalah "tauhid". Bertolak dari hal demikian, maka implikasinya harus tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum pendidikan, penentuan metode pendidikan, penciptaan lingkungan pendidikan dan pandangan terhadap konsep ilmu pengetahuan harus berorientasi pada nilai "tauhid" tersebut (Natsir, 1970 15-16).

Menurut Natsir, nilai-nilai kepesantrenan yang bersumber pada aqidah tauhid akan melahirkan kesadaran beribadah, yang pada gilirannya akan mampu mempertajam kecerdasan pemikiran dan kepekaan jiwa sehingga melahirkan keikhlasan dalam setiap tindakan. Hal ini pada gilirannya akan dapat membantu setiap individu dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat kearah yang diinginkan Islam.

Dari berbagai lembaga pendidikan Islam yang tersedia, Natsir memiliki perhatian serius terhadap keberadaan pondok pesantren. Posisi pesantren dalam pandangannya tidak dapat digantikan oleh lembaga pendidikan lain, termasuk madrasah, IAIN dan berbagai perguruan tinggi lainnya, karena pesantren memiliki karakter dan kepribadiaan tersendiri yang tugas pokoknya memperdalam pengetahuan keislaman, pandai mencari hukum agama, mampu *berijtihad*, dapat memahami isi kandungan al-Qur'an dan menge-tahui unsur-unsur lainnya yang sasaran akhirnya adalah mampu memberi peringatan kepada umat agar berhati-hati dalam kehidupan, sanggup menegakkan *amar makruf dan nahi mungkar*, dapat menjadi "hati nuarani" bagi masyarakat, berkepribadian bebas, berdisiplin dan mandiri (Natsir, 1970 : 15.

Natsir menyadari, peran pesantren pada masa lalu merupakan kubu pertahanan umat, tapi dalam era kini agak tersisihkan dari percaturan global, karena kekurang mampuannya mengantisipasi perubahan. Untuk itu Natsir menegaskan: "Dengan penuh kesadaran kita mengakui, bahwa pesantren itu harus tetap dibina dan harus dipelihara kepribadiannya, harus ditingkatkan kemampuannya untuk dapat menyumbangkan hasil karyanya yang lebih berarti bagi zaman sekarang ini dan masa yang akan datang (Natsir, 1970 : 23).

Pilar pendidikan Islam yang lain adalah masjid. Fungsi masjid menurut Natsir adalah sebagai sarana pembinaan ibadah dan pembentukan *dhomir* umat. Natsir memahami bahwa lembaga pendidikan formal tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembinaan dan pengembangan akhlak. Dengan demikian, maka fungsi masjid tidak hanya sekedar tempat shalat, tapi adalah lembaga pendidikan non formal dalam membimbing proses perhambaan diri pada Allah dalam artian yang seluas-luasnya. Sebagai lembaga pendidikan non formal, maka aktivitas masjid idealnya dapat menutup kekurangan yang dirasakan dalam lembaga pendidikan formal yang fokusnya lebih diarahkan pada pembinaan ibadah dan pembentukan akhlak masyarakat. Untuk lebih efektifnya fungsi masjid tersebut, maka idealnya di setiap lembaga pendidikan Islam tersedia sarana ibadah berupa masjid.

Pilar ketiga dalam pendidikan Islam adalah kampus. Yang dimaksud dengan kampus oleh Mohammad Natsir adalah lembaga pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun keagamaan. Fungsi lembaga ini lebih diarahkan pada pembentukan *ulul albab* (intelektual muslim) yang menguasai berbagai disiplin ilmu, baik secara akademik maupun profesional, yang meliputi ilmu-ilmu eksakta, sosial dan humaniora. Perbedaan kampus dengan pondok pesantren dalam pandangan Natsir adalah terletak pada proses pencarian ilmu dan sasaran yang ingin dicapai. Pesantren lebih berorientasi pada pemahaman ilmu keislaman untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kampus lebih menekankan pada pencarian dan pengembangan wacana ilmu pengetahuan. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Untuk tercapai

sasaran demikian, maka nilai-nilai islami harus hadir dalam setiap sikap, tindakan dan prilaku para akademisi di kampus.

Untuk mencapai sasaran ideal di atas, Natsir menyadari bahwa hal itu tidak mudah, tapi bukan pula sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan. Maka untuk merintis jalan ke arah itu, semestinya semua unsur-unsur pendidikan dapat mendukung sasaran dimaksud. Termasuk penyediaan media, penyusunan kurikulum dan kemampuan merancang lingkungan pendidikan sehingga memiliki ruh Islami.

Menurut Natsir, penyediaan berbagai alat dan media pendidikan sangat diperlukan bagi eksistensi dan pengembangan sebuah lembaga pendidikan, baik media cetak, elektronik dan sebagainya. Peserta didik yang ideal tidak hanya menimba ilmu di dalam kelas, tapi ia harus mampu melakukan pencarian sendiri dan menyelesai-kan sendiri persoalan-persoalan yang terjadi di dalam lingkungannya berdasarkan teori-teori yang telah dimilikinya. Untuk dapat melakukan hal demikian, maka keberadaan alat dan media pendidikan sangat diperlukan. Natsir menegaskan bahwa: "ilmu itu banyak tersebar sekarang ini di berbagai sarana dan media, di pasar buku, di perpustakaan, melalui media elektronik, kalau kita mempunyai transistor tinggal memutar knopnya, segala macam ilmu akan dapat didengar, tinggal kemampuan memahami dan menganalisa ilmu-ilmu tersebut (Natsir, 1970 : 33).

Sistem Nilai dalam Pendidikan Islam

Dalam bahasa Inggeris, "nilai" disebut dengan *value* yang berarti "harga yang bersifat abstrak". Sedangkan pemaknaan secara terminologis, "nilai" mengandung banyak arti sesuai dengan fokus permasalahan yang ingin dibahas. Jika dilihat dari sisi budaya, maka nilai berarti konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat bermakna dalam kehidupan manusia. Sedangkan dalam perspektif keagamaan, maka nilai merupakan konsep tentang penghargaan yang diberikan pada persoalan-persoalan pokok dalam kehidupan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman dalam tingkahlaku manusia (Depdikbud, 1994 : 690).

Bertolak dari beberapa pemaknaan di atas, seterusnya ditelusuri bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang nilai dimaksud. Dari beberapa uraiannya, Natsir terlihat kurang membahas persoalan nilai secara spesifik, malahan ia cenderung menempatkan antara akhlak, etika dan moral sebagai sebuah sinonim yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jika perilaku dilihat dalam perspektif Islam, maka Natsir cendrung menggunakan istilah akhlak. Keengganan Natsir menyikapi formulasi akhlak secara kritis, terkesan dari kekhawatirannya nilai-nilai tersebut akan terserabut dari sumber *ilahiah* yang dipandang absolut dan mapan. Persoalan demikian agaknya sejalan dengan statemen Amin Abdullah ketika mengeritik organisasi Muhammadiyah yang juga kurang mengembangkan pemikiran akhlak. M. Amin Abdullah menegaskan:

Ada dua aspek yang menyebabkan keengganan umat Islam, termasuk

Muhammadiyah melakukan interpretasi kritis dalam memahami etika karena; *Pertama,* ada anggapan bahwa melakukan kajian kritis terhadap akhlak akan dapat menipiskan kadar moralitas seseorang dan mudah melepaskan diri dari keterikatan dengan aturan norma yang berlaku. *Kedua*, kajian kritis akan dapat mengganggu kemapanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (M. Amin Abdullah, 1996 : 171).

Di sisi lain Amin Abdullah mengeritik pemahaman sebagaimana tersebut di atas dan menambahkan bahwa pemahaman seperti demikian agaknya perlu ditinjau kembali karena dapat mengakibatkan sikap *permissif* di kalangan umat Islam dan terkesan kurang memberikan penghargaan yang memadai terhadap akal manusia dalam merumuskan nilai-nilai moral Islami (M. Amin Abdullah, 1996 : 171).

Menurut Mohammad Natsir, akhlak dipahami sebagai "sifat yang berurat berakar pada diri seseorang, yang terbit dari padanya amal perbuatan secara spontan, tanpa dipikir-pikir dan tanpa ditimbang-timbang lagi" (Natsir, 2000 : 239). Dengan demikian baik atau buruknya amal perbuatan seseorang tergantung kepada baik atau buruknya akhlak pribadi yang dimilikinya.

Pada bagian lain Natsir menambahkan bahwa ukuran baik atau buruknya akhlak seseorang mengacu pada tuntunan yang digariskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun demikian nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dapat diterima sebagai implementasi akhlak sejauh tidak bertentangan dari kedua sumber tersebut di atas dan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hal itu dapat ditempatkan sebagai wilayah *ijtihadi* (Natsir, 2000 : 224).

Berbeda dengan persoalan etika yang memilah aspek nilai ke dalam dua bagian, yakni nilai baik dan nilai buruk. Natsir menegaskan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam akhlak islami mengacu pada lima tingkatan yang masing-masingnya memiliki implikasi hukum. Nilai-nilai tersebut adalah: "nilai baik", "agak baik" "netral", "agak buruk" dan "buruk". Nilai baik yang mengandung aspek hukum *wajib* adalah nilai terpuji yang harus direalisasikan, karena akan diberi pahala bagi yang melaksanakannya dan sangsi bagi yang meninggalkannya. Nilai agak baik disebut dengan *sunat* adalah nilai yang semestinya dapat direalisasikan, namun tidak diberi sangsi kalau belum mampu mewujudkannya. Nilai netral adalah nilai *mubah* yang boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. "Nilai tercela" adalah nilai *haram* yang harus dijauhi, karena di samping tidak baik bagi manusia juga diberi sangsi hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Nilai agak buruk adalah sesuatu yang *makruh* sehingga sebaiknya dihindari, namun dapat ditoleransi jika belum mampu meninggalkannya.

Dilihat dari sisi objeknya, menurut Natsir pengembangan akhlak semestinya difokuskan pada tiga sasaran, yakni akhlak individu, keluarga dan masyarakat. Terhadap individu, akhlak difokuskan pada pembentukan integritas pribadi yang berdisiplin, dalam kehidupan keluarga akhlak diarahkan pada penanaman prinsip-prinsip keteladanan, sedangkan dalam masyarakat akhlak

berorientasi pada jalinan kerjasama yang dilandasi nilai-nilai harmonis yang diterapkan secara bertanggung jawab dan saling memberikan manfaat. Untuk merealisasikan hal dimaksud, diperlukan *mawaddah*, yakni panggilan hati yang menawan dan akhlak budipekerti yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Untuk mendukung argumentasinya, Natsir mengutip surat Ali Imran ayat 159 yang artinya:

> *Maka dengan sebagian dari rahmat Allah, bahwa engkau bersikat lemah lembut kepada mereka, sekiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis tentulah mereka akan lari dari kelilingmu. Sebab itu maafkan kesalahan mereka dan mohonkan ampun untuk mereka* (Natsir, 2000 : 229).

Dalam tataran praktis, Natsir membagi akhlak ke dalam dua bagian, yakni akhlak terhadap Khalik dan akhlak terhadap sesama makhluk. Akhlak terhadap Khalik adalah berupa nilai-nilai keta'atan kepada Allah yang didasarkan pada prinsip tauhid dan direalisasikan dalam bentuk beribadah sehingga melahirkan rasa ikhlas dalam setiap tindakan. Sedangkan akhlak terhadap sesama makhluk, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam beserta isinya, hakekat akhlak adalah amal saleh yang didasarkan pada rasa keikhlasan (Natsir, 2000 : 229). Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari akhlak diarahkan pada dua aspek, yakni secara *vertikal* adalah perhambaan diri secara totalitas untuk mencari keridhaan Allah, sedangkan secara *horizontal* adalah mengembangkan semangat kerjasama yang berorientasi nilai-nilai islami guna membangun tataran kehidupan yang bersifat *rahmatan li al-alamin.*

Dalam pandangan Natsir, ibadah sebagai komunikasi *vertikal* terhadap Allah SWT sarat dengan nilai-nilai kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Fungsi ibadah di samping membentuk dan membangkitkan kekuatan pada pribadi manusia berupa daya disiplin diri dari dalam dan rasa tanggung jawab yang timbul dari *dhomir* dan hati nurani masing-masing, karena Allah adalah sumber segala kekuatan, baik lahir maupun bathin, yang maha mengetahui dan maha adil (Natsir, 2000 : 66).

Natsir mengibaratkan bahwa kehidupan ini bagaikan musafir yang selalu berjumpa dengan bermacam-macam "jurang" kehidupan. Ada jurang yang bernama *korupsi,* yang akan berjumpa dengan orang-orang yang sedang memegang amanah. Ada pula jurang yang bernama "kerusakan moral", karena meremehkan batas-batas kewajaran dalam pergaulan hidup sehari-hari. Begitu pula jurang-jurang lainnya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Untuk menghadapi jurang-jurang tersebut dibutuhkan kekuatan disiplin dari dalam diri dan kekuatan itu hanya dapat dicapai melalui nilai-nilai yang terkandung ibadah (Natsir, 2000 : 67).

Dalam pandangan Natsir, akhlak seseorang menyatu dalam "iman dan amal saleh". Jika kedua hal itu selalu dipupuk dan disuburkan, akan melahirkan prilaku *wara'* dan sekaligus akan mengantarkan seseorang pada kualitas tertinggi dari kehidupannya, yakni menjadi *"insan muttaqin".* Natsir menambahkan bahwa, kebahagiaan hidup di akhirat hanya akan dapat dicapai apabila bertaqwa kepada Allah

dan teraktualisasi dalam prilaku *wara'*. Menurut Natsir, *wara'* adalah kebersihan *dhomir* (hati nurani) yang terbebas dari sikap dan tingkah laku tercela (Natsir, 2000 : 250).

Di sisi lain Natsir menambahkan, bahwa untuk dapat mempertahankan konsistensi *akhlak al-karimah*, maka tauhid semestinya dijadikan pangkal tolak dalam berbuat dan tempat kembalinya semua amal perbuatan seseorang. Sedangkan ibadah merupakan proses pensucian jiwa, dengan kesucian jiwa itu seseorang dapat memperbarui iman, memperhalus kepekaan hati nurani dan pada akhirnya dapat meningkatkan kecerdasan intelektualnya (Yusril Ihza Mahendra, 1994 : 67).

Dalam pandangan Natsir, akhlak sesungguhnya tidak hanya berlaku dalam sesama Islam, tetapi bersifat universal yang prinsip-prinsipnya dibangun di atas landasan persatuan umat, persamaan derajat, keadilan, rasa kasih sayang, kejujuran, toleransi dan kesabaran (Yusril Ihza Mahendra, 1994 : 67). Menurut Natsir, sumber tenaga dan daya tarik seseorang tidak terletak pada ilmu dan hikmah yang dimilikinya, karena ilmu dan hikmah merupakan pembuka jalan untuk mencapai keberhasilan, sedangkan dayanya terletak pada akhlak pribadi yang ditampilkan (Natsir, 2000 : 239).

Dalam membangun akhlak pribadi tersebut, pada setiap individu melekat dua asas yang saling berkait, yakni asas "hak dan kewajiban". Berbicara tentang hak azazi manusia, menurut Natsir bahwa Islam tidak hanya terfokus pada mementingkan hak individual, tapi lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, karena hakekat keadilan terletak pada keseimbangan tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menegaskan:

> *"Sebenarnya hak dan kewajiban dalam Islam adalah dua nama bagi barang yang satu. Apa yang bagi seseorang merupa-kan kewajiban yang harus ditunaikan, hal itu sekaligus merupakan hak yang harus diterima oleh orang yang lain. Dalam Islam, hak bukanlah sesuatu yang mesti diperebutkan, akan tetapi lebih ditekankan pada perlombaan memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, bukan dipusatkan pada membiasakan diri menuntut hak individu, akan tetapi membiasakan diri memenuhi hak terhadap sesama manusia* (Natsir, 2000 : 68).

Berkait dengan upaya pengembangan nilai-nilai universal yang digagas Natsir diatas, maka posisi pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dimaklumi karena pendidikan merupakan sarana efektif dalam melakukan proses transformasi nilai-nilai pada peserta didik. Menurut Natsir tugas pendidikan semestinya memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan nilai-nilai *akhlak al-karimah* sebagaimana diungkapkan di atas. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perencanaan dan aktivitas pendidikan secara sistemik, baik melalui rancangan kurikulum, penyiapan materi, pemilihan metode, proses pengajaran dan lingkungan pendidikan. Baik melalui lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama. Bagi lembaga pendidikan agama semestinya bertugas menggali

dan mengembangkan nilai-nilai *akhlak al-karimah* agar senantiasa aktual dan dapat memenuhi tuntutan perubahan sosial, sementara lembaga pendidikan umum dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitasnya secara praktis (Natsir, 2000 : 68-72).

Pemikiran Pendidikan

Konsepsi Mohammad Natsir tentang pendidikan adalah tercapainya kemenangan *duniawi* dan kebahagiaan *ukhrawi*. Untuk merealisasikan konsepsi tersebut perlu diterapkan pola pendidikan yang mengacu pada keseimbangan antara kebutuhan *lahiriah* dan *batiniah*, antara kepentingan fisik dan paikhis melalui upaya optimalisasi *fitrah* yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup manusia. Pemikiran tersebut dapat ditemukan dalam beberapa karya tulisnya yang berjudul:

1. *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan dan Tanggung Jawab Civitas Akademica dan Perguruan Tinggi*, isinya memberikan telaahan tentang peranan perguruan tinggi sebagai *change without violence*. Dengan demikian corak sebuah perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat pendidikan dan pusat peradaban, tetapi sekaligus sebagai *moral power* dan menjadi hati nurani masyarakat. (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur, 1969).
2. *The New Morality (Moral Baru)*, Isi pokoknya mengajak umat Islam untuk dapat mewaspadai masuknya kebudayaan Barat yang di dalamnya terdapat cara-cara kehidupan mereka yang terlepas dari perinsip dasar agama. (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur, 1969).
3. *Kubu Pertahanan Mental dari Abad ke Abad*. Intinya membahas peranan Pondok Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur. 1970)
4. *Di Bawah Naungan Risalah*, Isinya menampilkan kisah-kisah perjuangan dan penderitaan yang dihadapi para sahabat Nabi dalam menebarkan missi dakwah Islam. Dalam kisah tersebut sarat dengan nilai-nilai edukatif yang penting ditanamkan pada peserta didik. (Jakarta: Media Dakwah, 1983)
5. *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia*. Membicarakan tentang pengalaman dan suka-duka yang diderita Mohammad Natsir ketika dalam berjuang menegakkan kebenaran di tengah tekanan penguasa yang cenderung otoriter dan melakukan berbagai penyimpangan dalam mempertahankan kekuasaannya (Jakarta: Media Dakwah, 1987).***

Kepustakaan

Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1996)

Ajib Rosidi, *M. Natsir, Sebuah Biografi*, (Jakarta : Girimukti Pasaka, 1990)

al-Abrasyi, *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Riyad: Dar al-Ahya',tt)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994)

Haryono, Anwar, dkk (ed) *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir,* Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

M. Habib Chirzin, Mohammad Natsir, sebagai Mujahid Dakwah dan Pendidik Bangsa, dalam Endang Syaifuddibn Anshari dan Amin Rais, *Pak Natsir 80 Tahun,* (Jakarta: Media Dakwah,1988)

Mohammad Natsir, *Capita Selecta,* Bandung : W. Van Hoeve, 1954.

----------, *Fiqhud Dakwah, Djedjak Risalah dan Dasar-Dasar Dakwah,* Malaysia : Poygraphic Press, 1981.

----------, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah,* (Bandung: Girimukti Pusaka, 1988)

----------, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan dan Tanggung Jawab Civitas Akademica dan Perguruan Tinggi,* (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur, 1969)

---------,*The New Morality (Moral Baru),* (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur, 1969)

---------, *Kubu Pertahanan Mental dari Abad ke Abad* (Surabaya: DDII Perwakilan Jawa Timur. 1970)

---------,- *Di Bawah Naungan Risalah,* (Jakarta: Media Dakwah, 1983)

---------,- *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia.* (Jakarta: Media Dakwah, 1987)

———, *Kubu Pertahanan Mental dari Abad ke Abad,* (Surabaya: DDII Perw. Jawa Timur, 1970)

Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir*, dalam "Islamika", (Jakarta: Mizan, 1994).